

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Umum Kelurahan Karangwaru

2.1.1. Wilayah Administratif

Karangwaru merupakan salah satu dari 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan ini terletak di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Kelurahan Karangwaru berada di sebelah timur Jalan Magelang (penghubung Kota Yogyakarta dengan Kota Magelang) yang merupakan bagian dari Jalan Nasional Rute 14. Kelurahan Karangwaru memiliki luas sebesar 71,99 Ha.

Adapun batas-batas administratif Kelurahan Karangwaru ialah:

- Utara: Dusun Mesan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati Kab. Sleman
- Selatan: Kampung Pakuningratan
- Barat: Jalan Magelang - Kel. Kricak
- Timur: Sungai Code dan Kel Cokrodiningratan Kec. Jetis

Wilayah Karangwaru memiliki 5 kampung administratif, antara lain: Karangwaru Lor (RW 01, 02, 03), Blunyahrejo (RW 04, 05, 06), Petinggen (RW 7, 08, 09), Bangirejo (RW 10, 11, 12) dan Karangwaru Kidul (RW 13, 14), yang terbagi dalam 14 RW dan 56 RT.

2.1.2. Demografi Penduduk

1. Data Jumlah penduduk (Data Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2016)

- a. Laki-laki : 4.798 orang
- b. Perempuan : 5.101 orang
- c. Total : 9.899 orang
- d. Jumlah KK : 3.172 KK
- e. Kepadatan : 137,67 orang per kilometer (jumlah penduduk dibagi luas wilayah dikali 100 orang per km)

2. Jumlah Berdasarkan Agama Masyarakat (Data Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2016)

- a. Islam : 8.351 orang
- b. Kristen : 698 orang
- c. Katolik : 819 orang
- d. Hindu : 9 orang
- e. Budha : 22 orang

3. Gambaran Usia Masyarakat (Data Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2016).

Tabel 2.1**Kategori Usia**

Kategori Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
Usia Anak-anak (0-14 Tahun)	1.063 orang	1.005 orang	2.068 orang
Usia Produktif (15-64 Tahun)	3.357 orang	3.606 orang	6.963 orang
Usia Lansia (> 65 Tahun)	490 orang	490 orang	868 orang

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

4. Bidang pekerjaan penduduk usia produktif (Data Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2016)

Tabel 2.2**Pekerjaan penduduk**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Rumah Tangga	1	1.468
Pelajar/Mahasiswa	902	825
Pensiunan	194	110
Belum Bekerja	99	111
PNS	178	139
TNI	9	1
POLRI	10	1
Pejabat Negara	0	0
Buruh/Tukang	270	117
Petani/Peternak	9	6
Karyawan BUMN/BUMD	33	28
Karyawan Swasta	1.298	852
Wiraswasta	709	408
Tenaga Medis	23	26
Pekerjaan Lain	10	24

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

2.1.3. Sosial Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, Kelurahan Karangwaru terbagi menjadi dua tipe masyarakat yaitu masyarakat yang tinggal diwilayah perkotaan dan masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Masyarakat yang tinggal diwilayah perkotaan membentuk hubungan sosial masyarakat yang bisa dikatakan cenderung tertutup,

privat dan individualis. Sedangkan masyarakat yang tinggal diwilayah bantaran Sungai Buntung meliputi kampung Karangwaru Lor, Blunyahrejo dan Karangwaru Kidul lebih agak konservatif dan gotongroyong.

Di Karangwaru terdapat sebuah gerakan Kampung Ramah Anak atau yang biasa disebut KRA. Kegiatan ini memiliki fasilitas berupa perpustakaan, dolanan jawa tradisional, serta menyediakan khursus memainkan gamelan jawa bagi anak yang ingin mengikuti. Kegiatan di atas turut menggandeng pemuda pemudi di Kelurahan Karangwaru.

Setelah dimulai penataan lingkungan di sungai buntung kehidupan sosial masyarakat semakin erat, karena awalnya antar kampung yang terpisah karena sungai berubah menjadi gotong royong untuk membersihkan sungai. Tidak hanya itu sekarang di sungai buntung juga telah didirikan Omah Sinau Masyarakat dan Anak Sekolah (omsimas) yang rutin membuat kegiatan setiap ulannya dan juga menjadi tempat berkumpul masyarakat dan seringkali digunakan pihak luar untuk menadakan event tertentu maupun program pengabdian masyarakat.

Sungai buntung yang awalnya pusat kekumuhan di Kelurahan Karangwaru sekarang telah menjadi ruang terbuka hijau bagi public dan bahkan menjadi objek wisata yang dinamakan Karangwaru Riverside. Untuk pemeliharaan dan perawatan Karangwaru Riverside ini masyarakat dengan sukarela dan kesadaran membentuk sebuah komunitas mereka menamakannya Komunitas Karangwaru Riverside. Anggota merupakan relawan dari masyarakat tanpa dibayar maupun mengharapkan bayaran. Karena efektifnya komunitas ini dalam menjaga dan memelihara sungai

buntung, maka pada tahun 2018 lalu pihak BKM menjadikan Komunitas Karangwaru Riverside menjadi unit khusus dalam kepengurusan BKM guna memperjelas fungsi dan posisi komunitas untuk menjaga dan merawat sungai.

2.2. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Mandiri (BKM) Tridaya Waru Mandiri Kelurahan Karangwaru

BKM Tridaya Waru Mandiri terbentuk pada tahun 1999, BKM dibentuk melalui rembung warga Kelurahan Karangwaru yang dihadiri pengurus LKMD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, Lembaga di tingkat kelurahan dan fasilitator kelurahan. Dalam rembung tersebut disepakati membentuk BKM yang diberi nama Waru Arta Mandiri. BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat kelurahan. Sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

BKM juga merupakan milik seluruh masyarakat dan bukan milik pemerintah, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dan merupakan wadah sinergis seluruh masyarakat warga desa. BKM berazaskan Pancasila dan UUD 1945, landasan dan dasar filosofis lembaga ini adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat menanggulangi kemiskinan secara kemandirian, efektif dan berkelanjutan. Anggota BKM haruslah relawan dan tidak boleh dibayar karena relawan adalah manifestasi dari nilai ikhlas/tanpa pamrih yang merupakan salah satu kriteria dasar calon anggota BKM. Anggota BKM bukan orang bayaran (terikat kepada yang membayar) melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar

memberikan sebagian waktunya untuk orang lain. Sebagai disinsentif bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik.

Pada awalnya kegiatan BKM adalah menggulirkan dana modal atau simpan pinjam dari P2PK (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Seiring berkembangnya kebijakan pada tahun 2007 lahirlah PNPM yang mana ini adalah lanjutan dari P2KP yang kegiatannya berasaskan pemberdayaan masyarakat melalui tridaya. Pada tahun 2008 BKM Waru Artha dinyatakan sebagai BKM sehat se Kota Yogyakarta dan meraih Juara 2 BKM Award. Dengan Prestasi ini BKM berkesempatan mengirim Proposal Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang mana Karangwaru menjadi salah satu dari 12 Lokasi Percontohan PLPBK di Kota Yogyakarta.

Proposal tersebut berhasil diterima dan berkesempatan menerima dana stimulan program PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2010. BKM Waru Artha tidak lagi berfokus pada perguliran dana simpan pinjam tapi berkembang pada Penataan Lingkungan Permukiman untuk itu BKM Waru Artha berganti nama Menjadi BKM Tridaya Waru Mandiri yang memilik 3 Unit Pelaksana (Bidang Keuangan, Bidang Sosial dan Bidang Lingkungan).

2.2.1. Visi dan Misi BKM Tridaya Waru Mandiri

Visi : terwujudnya masyarakat kelurahan karangwaru yang sejahterah dalam permukiman yang nyaman huni.

Misi :

1. Mendayagunakan potensial modal sosial yang ada
2. Menanggulangi kemiskinan ekonomi melalui dana yang ada di upk
3. Merenovasi rumah tidak layak huni
4. Memberi pelatihan-pelatihan kepada keluarga yang kurang mampu agar bangkit ekonominya
5. Membangun sarana dan prasarana lingkungan yang tertata dan mudah diakses
6. Mewujudkan Kawasan permukiman yang hijau asri dan produktif
7. Menggalakkan kesadaran masyarakat berpola hidup sehat dan air bersih
8. Menciptakan kesadaran masyarakat yang tertib dan sadar hukum
9. Menumbuh kembangkan potensi kehidupan perekonomian masyarakat
10. Melestarikan dan mengembangkan budaya yang telah tumbuh berbasis kearifan local
11. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat.

2.2.2. Tujuan BKM Tridaya Waru Mandiri

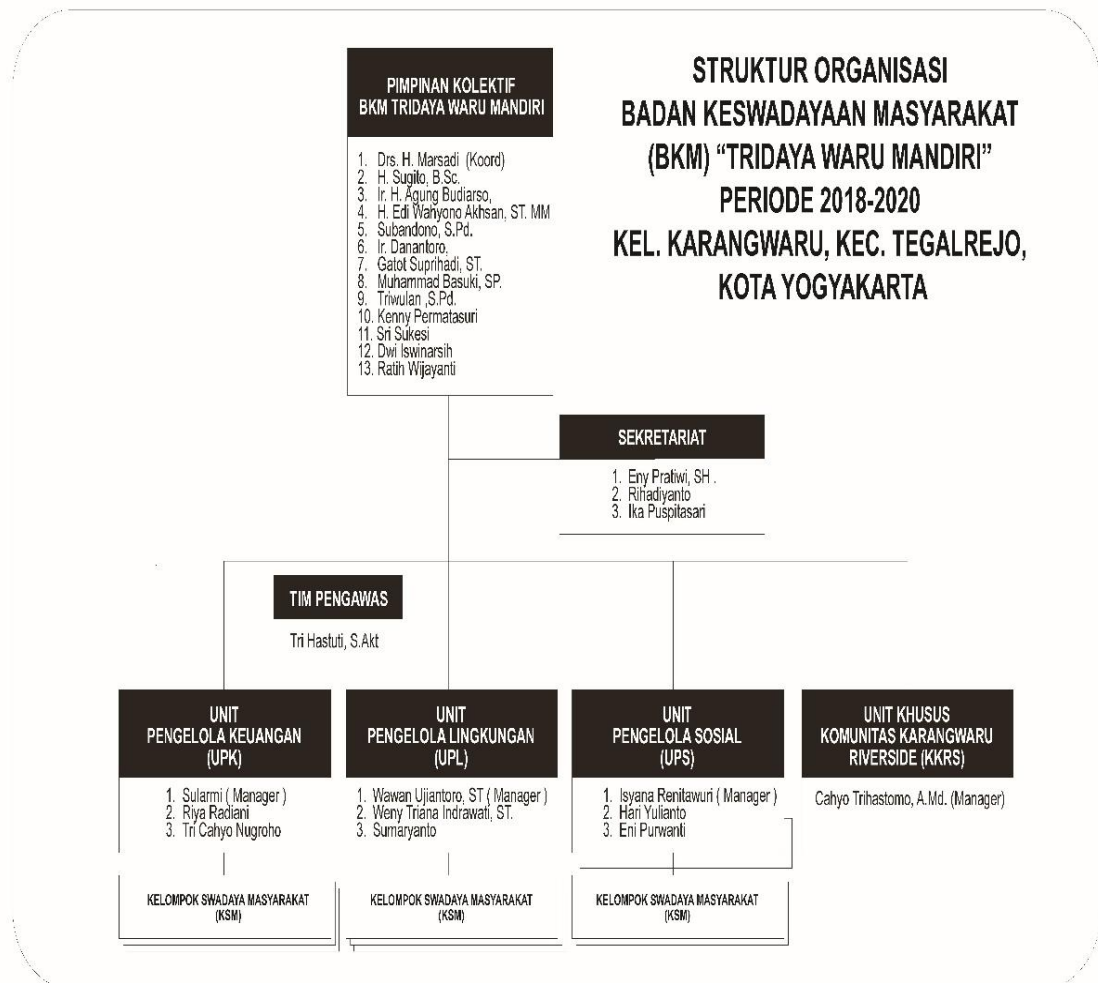
- Untuk memimpin masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan agar lebih terarah, terorganisir dan berkelanjutan
- Sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengolah berbagai program dan dana bantuan pengurangan kemiskinan baik dari pemerintah swasta maupun kelompok yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan

2.2.3. Fungsi BKM Tridaya Waru Mandiri

- Penggerak dan penumbuh kembali nilai-nilai luhur kemasyarakatan dan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata bermasyarakat
- Penggerak proses pengembangan aturan dan kode etik dalam penanggulangan kemiskinan
- Penggerak proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan dan akuntabel dan demokratis dalam penanggulangan kemiskinan
- Pengendali dan control social terhadap proses pembangunan
- Motor penggerak dan media aspirasi dari partisipasi masyarakat
- Wadah komunikasi dan informasi bagi masyarakat
- Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat
- Mitra kerja pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas masyarakat

2.2.5. Struktur BKM Tridaya Waru Mandiri

Gambar 2.1
Struktur BKM Tridaya Waru Mandiri



Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri

2.3. Gambaran Umum Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan Program lanjutan dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

2.3.2. Tujuan dan Indikator Program KOTAKU

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Indikator tersebut adalah:

1. Bangunan Gedung

- Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
- kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
- ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.

2. Jalan Lingkungan

- Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
- Lebar jalan yang tidak memadai;
- Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

3. Penyediaan Air Minum

- Ketidakterediaan akses air minum;
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
- Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

4. Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
- Menimbulkan bau;
- Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

5. Pengelolaan Air Limbah

- Ketidakterediaan sistem pengelolaan air limbah;
- Ketidakterediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
- Tercemarnya lingkungan sekitar.

6. Pengelolaan Persampahan

- Ketidakterediaan sistem pengelolaan persampahan;
- Ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.

7. Pengamanan Kebakaran

- Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
- Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;

- Ketidakterediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.

8. Ruang Terbuka Publik

- Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
- Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

2.3.3. Strategi Operasional Program KOTAKU

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai

berikut:

- 1) Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat;
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multisektor dan multi-aktor;
- 4) Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;

- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
- 7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

2.3.4. Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

- 1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda. Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh
- 2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan program.
- 3) Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota
- 4) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD.
- 5) Partisipatif. Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*)

- 6) Kreatif dan Inovatif. Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh
- 7) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah pemerintah kelurahan dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik.
- 8) Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan

2.4. Gambaran Umum Wilayah Kumuh dan Penataan Lingkungan Kelurahan Karangwaru

Kelurahan Karangwaru adalah salah satu Kelurahan yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi di pusat Kota Yogyakarta. Jika tidak dikawal dengan perencanaan yang baik mengenai pemanfaatan lahan, tentu akan berpotensi tinggi memicu kekumuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru yang menjadi grand design penataan permukiman untuk lima tahun ke depan. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan informasi yang aktual dan substansial serta menjadi panduan pembangunan baik di tingkat kawasan maupun sektoral tertentu di Kelurahan Karangwaru.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Yogyakarta No. 393 Tahun 2014 mengenai luas kawasan, kota Yogyakarta pada tahun 2014 memiliki kawasan kumuh seluas 277,8 hektar. Sementara wilayah Kelurahan Karangwaru sendiri seluas 10,21 hektar.

Tabel 2.3

Kawasan kumuh kelurahan Karangwaru

RW	RT
RW-01	02 dan 03
RW-02	04
RW-03	07 dan 09
RW-04	10, 12 dan 13
RW-05	15, 16, 17, 18 dan 19
RW-06	20 dan 21
RW-11	39, 40, 41
RW-14	51, 52 dan 53

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

Menghadapi masalah kekumuhan tersebut, mau tak mau pemerintah di berbagai tingkatan harus saling berkolaborasi untuk menangani laju pertumbuhan penduduk sekaligus melakukan penataan kawasan. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang strategis dengan melibatkan partisipasi semua pihak agar sebuah kota tidak menjadi kumuh. Hal ini merujuk pada UU Nomor 1 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua orang yang tinggal di dalamnya.

Perencanaan timbul karena kegiatan-kegiatan tiap individu didasarkan pada seluruh sumber daya yang dikuasai. Berlangsungnya kegiatan-kegiatan individu tersebut sudah tentu berkat dorongan motivasi yang kuat, yakni demi tercapainya

harapan, tujuan, kebutuhan, dan cita-cita demi peningkatan taraf hidupnya. Biasanya, dalam melakukan sebuah kegiatan seringkali disertai dengan hal-hal yang tidak pasti. Hal ini sangat besar kemungkinan terjadinya, antara lain karena keadaan cuaca hingga faktor-faktor sosial di dalam sebuah masyarakat. Melalui sebuah perencanaan yang strategis dengan melibatkan warga masyarakat, maka asumsi-asumsi mengenai kegagalan pembangunan tentu dapat dielakkan.

2.4.1. Sejarah Penataan Lingkungan Permukiman di Karangwaru

Pada tahun 1999 penataan lingkungan permukiman di Karangwaru dimulai dengan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau yang dikenal dengan P2KP. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban).

P2KP sebagai suatu proyek merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya proyek yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi "program" penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Penekanan lanjut dari P2KP ini adalah PLPBK, program ini merupakan stimulan bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan-kelurahan sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi "BKM Berdaya menuju Mandiri" atau "BKM Mandiri ". Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. Kegiatan PLP-BK ini hanya dapat diakses oleh BKM yang telah mencapai kualifikasi "BKM Berdaya menuju Mandiri atau BKM Mandiri".

Pada tahun 2007 Departemen Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) namun digabungkan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Departemen Dalam Negeri dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pada tahun 2015 program ini berganti menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) dimana program ini dinahkodai oleh pemerintah daerah. Namun berselang setahun berganti nama menjadi Program Kotaku.

2.4.2. Permasalahan Lingkungan Prioritas

Tabel 2.4
Penentuan Kawasan Prioritas

No	KEGIATAN	PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS																					
		PEMANFAATAN LAHAN			RUANG TERBUKA			INRASTRUKTUR			AKSESIBILITAS			KONDISI BANGUNAN			KEPADATAN PENDUDUK & BANG			EKONOMI			
		SESUAI	TIDAK SESUAI	MENYIMPANG	BAIK	SEDANG	KURANG	BANYAK	KURANG	TD KADA	MUDAH	KURANG	SULIT	BAIK	SEDANG	KURANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	UR	PUNYA DAYA SAH	BIASA	TOTAL
1	Penataan DAS S. Buntung			3			3			3			2			3			3			3	20
2	Pengembangan Wisata			3			3	1				2		2			2					3	16
3	Ruang Terbuka		2			2		1				2	1			1					2		11
4	Pengembangan UKM		2			1		1				2		2			2					3	13
5	Penataan Infrastruktur	1				2				3		1				3		2			2		14
6	Penataan Permukiman		2				3		2			2		2					3	1			15

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

Berdasarkan penilaian menurut bobot nilai yang telah ditetapkan dan di sepakati bersama di dapatkan prioritas - prioritas pekerjaan untuk jangka panjang maupun pendek. Prioritas pekerjaan tersebut meliputi :

1. Prioritas pertama yaitu penataan sungai buntung
2. Prioritas ke dua yaitu pengembangan wisata
3. Prioritas ke tiga yaitu penataan permukiman

4. Prioritas ke empat yaitu penataan infrastruktur

5. Prioritas ke lima yaitu pengembangan ukm

a. Kondisi Fisik Bangunan

Secara keseluruhan kondisi fisik bangunan relatif sudah baik namun masih ada rumah yang masih perlu perhatian dalam hal perbaikan. Kondisi bangunan yang kurang layak huni kebanyakan adalah kondisi rumah yang dinding belum di plester, dinding masih dari bambu walaupun hanya sebagian, atap rumah yang sudah rusak/bocor di karenakan masih menggunakan genteng lama serta lantai yang belum sempurna di karenakan hanya di plester dan belum di aci. Rumah dengan kondisi tidak layak huni di karenakan pemilik rumah mengindung atau masih tinggal dirumah yang tanahnya milik keraton (sultan ground) sehingga rumah tidak boleh untuk di renovasi Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa : - 30 % Bangunan Hunian tidak memiliki keteraturan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan berada di RW 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 14 - Kawasan permukiman memiliki Kepadatan Rendah (30 unit/Ha) - 11 % Bangunan hunian memiliki Luas Lantai < 7,2 m² per orang - 18 % Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Dinding, Lantai tidak sesuai persyaratan teknis.

Tabel 2.5
Kondisi Fisik Bangunan

Kriteria/ Indikator	Volume		Satuan	Parameter
Keteraturan bangunan	30%	380	Unit	Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan
Kepadatan bangunan				Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (30 unit/Ha)
Kelayakan fisik bangunan	11%	139	Unit	Bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 m ² per orang
	18%	228	Unit	Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding, lantai tidak sesuai persyaratan teknis

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

b. Kondisi Jaringan Jalan

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan suatu kawasan untuk dijangkau dan keterhubungan dengan kawasan lainnya. Dengan demikian, jika suatu kawasan disebut memiliki aksesibilitas tinggi, berarti semakin mudah kawasan tersebut untuk dijangkau dan memiliki keterhubungan yang kuat dengan kawasan lainnya. Dengan melihat pola jaringan jalan di Kelurahan Karangwaru secara umum membentuk pola cabang-ranting (seperti pohon), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Aksesibilitas antar kawasan utama relatif mudah karena dihubungkan jalan utama. 2. Aksesibilitas antara kawasan utama dengan kawasan pinggiran juga mudah karena dihubungkan jaringan cabang dan ranting yang langsung mengakses ke jaringan utama 3. Aksesibilitas menuju Kelurahan

Karangwaru dapat ditempuh melalui ; Jl. Magelang, Jl. AM. Sangaji dan Jl. Wolter Monginsidi. Aksesibilitas didalam kawasan dapat di capai melalui Jalan Gotong Royong dan jalan lingkungan . Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa :

- 25 % Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai. Jaringan jalan lingkungan yang tidak memadai tersebar di Blunyajrejo RW 06 dan Bangirejo RW 10, 11 dan 12 - 38 % Kondisi Jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk.

Tabel 2.6
Kondisi Jaringan Jalan

Kriteria/ Indikator	Volume		Satuan	Parameter
Aksesibilitas lingkungan	25%	4.151,12	M	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai
Kepadatan bangunan	38%	2.462,5	M	Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

c. Kondisi Jaringan Drainase

Secara umum pembuangan akhir air hujan maupun air kotor dari permukiman di Kelurahan Karangwaru mempunyai tiga macam yaitu : pembuangan drainase ke Sungai Buntung dan Sungai Winongo, pembuangan air drainase dengan sistem Biofori, drainase di alirkan ke SPAH (Saluran Peresapan Air Hujan) Hanya sistem pembuangan tersebut belum terbangun secara maksimal, drainase antar ruas jalan yang satu dengan yang lain belum tersambung secara utuh

/ bersifat spasial. Kondisi seperti ini menyebabkan beberapa daerah masih menjadi rawan terhadap genangan air hujan, meskipun sifat genangan sesaat dan mudah surut.

Sementara itu pada beberapa wilayah sistem drainase masih belum ada dan air mengalir mengikuti pola jalan dan diatas badan jalan khususnya adalah untuk wilayah yang mempunyai jalan tidak sesuai persyaratan teknis, yaitu lebar jalan hanya 1 – 1,2 m. Permasalahan yang terjadi untuk sistem drainase adalah masih banyaknya warga yang memanfaatkan saluran drainase untuk membuang limbah rumah tangga dan masih tidak terawatnya saluran drainase yang ada. Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa : - 0 % Kawasan permukiman terjadi genangan/banjir - 7 % Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk Untuk kawasan yang mempunyai aksesibilitas lingkungan yang sempit atau jalan lingkungan kurang dari 1,25 meter sebagian besar belum ada jaringan drainase atau Saluran Air Hujan (SAH) sehingga air hujan melalui jalan tersebut dan mengakibatkan jalan cepat mengalami kerusakan.

Tabel 2.7

Kondisi Jaringan Drainase

Kriteria/ Indikator	Volume	Satuan	Parameter
Drainase Lingkungan	0%		M Kawasan pemukiman terjadi genangan/banjir
	7%	3.168,5	M Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

d. Kondisi Persampahan

Di Kelurahan Karangwaru hampir di sejumlah wilayah belum tersedia TPS (Tempat pembuangan sampah sementara). Sebagian besar sistem pengolahan sampah rumah tangga ditempatkan di tong sampah yang berada di tiap rumah. Dari tong, sampah diangkut dengan gerobak atau truk oleh petugas kebersihan. Sebulan sekali warga di pungut biaya untuk petugas sampah. Untuk pemukiman di sepanjang sungai Buntung, sampah banyak di buang ke sungai. Hal ini mengakibatkan kondisi sungai sangat kotor dan bisa berakibat banjir dan pendangkalan. Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa :

- 12 % Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu.

Tabel 2.8

Kondisi Persampahan

Kriteria/ Indikator	Volume		Satuan	Parameter
Pengelolaan Persampahan	19%	316	KK	Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

e. Kondisi Air Minum

Pelayanan Air bersih di Kelurahan Karangwaru meliputi : Sumber air minum baku dari sumur, Pelayanan Sumber air bersih dari PDAM. Adanya pengaruh sistem sanitasi dan pengolahan air limbah yang kurang terkontrol dan tertata hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air bersih di Kelurahan Karangwaru khususnya yang

memgunakan sumur diduga air bersih baku dari sumur warga telah tercemar oleh bakteri coli. Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa :

- 18 % Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak - 1 % Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)

Tabel 2.9
Kondisi Air Minum

Kriteria/ Indikator	Volume		Satuan	Parameter
Pelayanan air minum/baku	18%	314	KK	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan air bersih/ baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak
	1%	166	KK	Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019

f. Kondisi Limbah

Masalah pengelolaan air limbah memang masih menjadi persoalan yang masih banyak di temui di lapangan dimana limbah belum di kelola dengan baik. Hal ini dapat di liat dari kondisi riil lapangan bahwa limbah rumah tangga masih banyak menjadi satu dengan saluran Air Hujan (SAH) dan limbah dari MCK belum terintegrasi dengan riol kota. Bahkan sebagian masyarakat yang berada di bantaran sungai buntung membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Hal ini dapat mengurangi kualitas dari sungai tersebut. Namun di beberapa wilayah sudah ada

IPAL Komunal dan Biofil, seperti di RT 19 RW 05 sudah ada IPAL Komunal yang bisa menampung sekitar 125 KK dan di RW 04 dan RW 05 ada biofil yang bisa menampung 70 KK. Dengan demikian di harapkan pengelolaan air limbah sudah menggunakan IPAL Komunal atau Biofil. Selain itu juga adanya riol kota atau asenering kota belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Wilayah yang sudah ada Jaringan Asenering Kota, yaitu Blunyahrejo, Petinggen dan Bangirejo

Berdasarkan dari data Baseline 100-0-100 di ketahui bahwa :

- 4 % Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses Jamban/MCK Komunal
- 17 % Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik
- 12 % Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tercampur dengan Drainase Lingkungan.

Tabel 2.10

Kondisi Limbah

Kriteria/ Indikator	Volume		Satuan	Parameter
Pengelolaan air limbah	4%	66	KK	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK komunal
	7%	282	KK	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik
	12%	1497,5	M	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan

Sumber : BKM Tridaya Waru Mandiri 2019